



Source: <https://dpra.acehprov.go.id/>

Judul Tugas Akhir Skripsi:

**DINAMIKA *INTERGOVERNMENTAL RELATIONS* DAN KEBERLANJUTAN
KKR ACEH: STUDI ATAS REKOMENDASI PENCABUTAN QANUN NO. 17
TAHUN 2013 OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Tugas Akhir Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik.

Nama: Najwa Sabilla

NIM: 2210413188



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA**

**Dinamika *Intergovernmental Relations* Dan Keberlanjutan KKR
Aceh: Studi Atas Rekomendasi Pencabutan Qanun No. 17 Tahun
2013 Oleh Kementerian Dalam Negeri**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu
Politik



NAJWA SABILLA

2210413188

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar:

Nama : Najwa Sabilla
NIM : 2210413188
Program Studi : S1 Ilmu Politik

Bilama di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka, saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 01 Juli 2026

Yang menyatakan,


(Najwa Sabilla)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI / TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najwa Sabilla
NIM : 2210413188
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : S1 Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**DINAMIKA INTERGOVERNMENTAL RELATIONS DAN
KEBERLANJUTAN KKR ACEH: STUDI ATAS REKOMENDASI
PENCABUTAN QANUN NO. 17 TAHUN 2013 OLEH KEMENTERIAN
DALAM NEGERI**

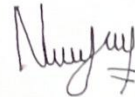
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Skripsi/Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya:

Dibuat di : Jakarta,

Pada tanggal : 28 Juli 2026

Yang menyatakan,



(Najwa Sabilla)

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA : NAJWA SABILLA
NIM : 2210413188
PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK
JUDUL : DINAMIKA *INTERGOVERNMENTAL RELATIONS* DAN
KEBERLANJUTAN KKR ACEH: STUDI ATAS
REKOMENDASI PENCABUTAN QANUN NO. 17
TAHUN 2013 OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

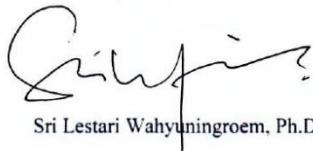
Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pembimbing



Dr. Ardli Johan Kusuma, M.HI.

Penguji 1


Sri Lestari Wahyuningroem, Ph.D

Penguji 2



Dr. Abdul Ghofur, S.S., M.IP

Ketua Program Studi
Ilmu Politik



Restu Rahmawati, S.Sos., MA.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 14 Juli 2026

**Dinamika *Intergovernmental Relations* Dan Keberlanjutan KKR
Aceh: Studi Atas Rekomendasi Pencabutan Qanun No. 17 Tahun
2013 Oleh Kementerian Dalam Negeri**

NAJWA SABILLA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika *intergovernmental relations* antara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Aceh dalam merespons rekomendasi pencabutan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, sekaligus mengkaji implikasinya terhadap keberlanjutan kelembagaan KKR Aceh. Penelitian ini menggunakan model *overlapping authority*, kerangka desentralisasi asimetris, dan keberlanjutan lembaga. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan empat narasumber yaitu akademisi, Ketua KKR Aceh, Sekretaris Komisi I DPR Aceh, dan analis kebijakan Kemendagri, serta studi pustaka. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, disertai triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Kemendagri dan Pemerintah Aceh saling beririsan pada persoalan yang sama, sehingga tidak ada pihak yang dapat menyelesaikannya sendiri. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, Kemendagri tidak lagi berwenang membatalkan qanun, sehingga rekomendasi pencabutan tidak mengikat secara hukum dan hanya menjadi tekanan politik, sementara Pemerintah Aceh juga tidak dapat menguatkan qanun tanpa dukungan pusat. Akibatnya, persoalan ini tidak diselesaikan, melainkan dibiarkan tanpa kepastian. KKR Aceh tetap ada secara formal tetapi berjalan stagnan; dukungan hukumnya melemah, dan bertahan terutama karena legitimasi moralnya sebagai lembaga keadilan transisi, bukan karena kepastian hukum.

Kata kunci: *intergovernmental relations*, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, KKR Aceh, Qanun

Intergovernmental Relations Dynamics and the Institutional Sustainability of the Aceh Truth and Reconciliation Commission: A Study of the Ministry of Home Affairs' Recommendation to Revoke Qanun No. 17 of 2013

NAJWA SABILLA

ABSTRACT

This study analyzes the intergovernmental relations between the Ministry of Home Affairs and the Government of Aceh in responding to the recommendation to revoke Aceh Qanun No. 17 of 2013 on the Aceh Truth and Reconciliation Commission (TRC), and examines its implications for the TRC's institutional sustainability. It applies the overlapping authority model, asymmetric decentralization, and institutional sustainability, using a qualitative case study. Data were gathered through interviews with four informants, namely an academic, the Chair of the Aceh TRC, the Secretary of Commission I of the Aceh House of Representatives (DPRA), and a Ministry of Home Affairs policy analyst, alongside a literature review, then analyzed using the Miles and Huberman model of data reduction, data display, and conclusion drawing, with triangulation. The findings show that the two parties' authority overlaps on the same issue, so neither can resolve it alone. After the Constitutional Court's ruling, the Ministry can no longer annul a qanun, so the recommendation is not legally binding and serves only as political pressure, while Aceh cannot strengthen the qanun without central support. The issue is thus left unresolved. The Aceh TRC formally persists but stagnates, enduring mainly through its moral legitimacy as a transitional justice institution rather than legal certainty.

Keywords: *intergovernmental relations; Central Government; Regional Government; Aceh TRC; Qanun*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Dinamika *Intergovernmental Relations* dan Keberlanjutan KKR Aceh: Studi atas Rekomendasi Pencabutan Qanun Nomor 17 Tahun 2013 oleh Kementerian Dalam Negeri." Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik. Proses penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan. Mulai dari proses mencari data, menyusun argumentasi, hingga menyelesaikan setiap tahap penelitian, semuanya memberikan pengalaman dan pembelajaran yang berharga bagi penulis. Selama proses tersebut, penulis mendapatkan banyak bantuan, arahan, doa, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan, serta jalan terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Mawardi dan Ibu Mariana, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kepercayaan kepada penulis. Terima kasih karena tidak pernah berhenti mendampingi setiap proses yang penulis jalani. Dalam berbagai keadaan, terutama ketika penulis mengalami kesulitan selama menyusun skripsi, Papah dan Mamah selalu berusaha membantu semampunya tanpa pernah lelah memberikan semangat.
3. Bapak Dr. Ardli Johan Kusuma, M.HI., selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis sejak awal hingga selesainya penelitian ini. Terima kasih atas kesabaran, arahan, kritik, dan masukan yang selalu diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lebih baik.
4. Ibu Sri Lestari Wahyuningroem, M.A., Ph.D. dan Bapak Abdul Ghofur, S.S., M.IP., selaku dosen penguji, yang telah memberikan berbagai masukan, kritik, dan saran yang membangun sehingga penelitian ini menjadi lebih baik.
5. Bapak Adam Oktavianoro, Bapak Arif Fadillah, Bapak Matshur Yahya, dan Bapak Kurniawan, yang telah bersedia menjadi narasumber dalam

penelitian ini. Terima kasih atas waktu, pengalaman, dan pandangan yang telah dibagikan kepada penulis.

6. Seluruh keluarga besar penulis, yang selalu memberikan doa dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Kedua adik laki-laki penulis, yang selalu menghadirkan semangat dan keceriaan di tengah proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus menyelesaikan apa yang telah dimulai.
8. Tarisa Asmarani, Areta Nadhifia, Desi Larasati, Fathia Binda, dan Fitria Ramadhani, sahabat penulis sejak masa SMP dan SMA, yang tetap menjaga hubungan baik serta memberikan perhatian dan semangat kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.
9. Adinda Meiliani, Fitria Azizah, Nailah Alifah, Nasywa Rahma, Putri Ayu, Raisha Maulidza, dan Wardah Destia, teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan, yang telah menjadi bagian dari proses belajar, berdiskusi, dan menjalani berbagai pengalaman selama menempuh pendidikan.
10. Dan terakhir, kepada diri sendiri, atas usaha, ketekunan, dan komitmen untuk menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini hingga akhir.

Seluruh bantuan, doa, dan dukungan yang penulis terima selama proses penyusunan skripsi ini merupakan hal yang sangat berarti. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penelitian ini. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Depok, 28 Juni 2026



Najwa Sabilla

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	13
1.1 Latar Belakang	13
1.2 Rumusan Masalah	23
1.3 Tujuan Penelitian.....	24
1.4 Batasan Masalah.....	24
1.5 Manfaat Penelitian	24
1.6 Sistematika Penelitian	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
2.1 Penelitian Terdahulu.....	27
2.2 Teori dan Konsep Penelitian	31
2.2.1 Teori <i>Intergovernmental Relations: Model Overlapping Authority</i>	31
2.2.2 Desentralisasi Asimetris Dalam Teori Desentralisasi.....	35
2.2.3 Keberlanjutan Kelembagaan	37
2.3 Alur Penelitian / Kerangka Pemikiran.....	39
2.4 Keterangan Kerangka Pemikiran	39
BAB III METODELOGI.....	41
3.1 Objek Penelitian	41
3.2 Jenis Penelitian.....	41
3.3 Teknik Pengumpulan Data	42
3.3.1 Wawancara	43
3.3.2 Studi Pustaka.....	44
3.4 Sumber Data.....	44
3.4.1 Data Primer	45

3.4.2 Data Sekunder	45
3.5 Teknik Analisis Data	45
3.5.1 Reduksi Data	46
3.5.2 Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	46
3.5.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (<i>Conclusion Drawing/Verification</i>)	46
3.6 Tabel Rencana Waktu Penelitian	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Gambaran Umum KKR Aceh dan Kedudukannya dalam Otonomi Khusus Aceh	48
4.2 Dinamika Hubungan Antarpemerintahan Kemendagri dan Pemerintah Aceh atas Rekomendasi Pencabutan Qanun Nomor 17 Tahun 2013	52
4.2.1 Kewenangan Kemendagri dan Mekanisme Fasilitasi atas Produk Hukum Daerah	54
4.2.2 Perbedaan Penafsiran atas Dasar Hukum KKR Aceh	61
4.2.3 Pola Interaksi dan Ketidakpastian yang Sengaja Dibiarkan	69
4.3 Respons Pemerintah Aceh terhadap Rekomendasi Pencabutan.....	78
4.3.1 Koordinasi Antarlembaga dan Argumentasi Balasan Daerah	78
4.3.2 Sikap Pemerintah Aceh dan Usulan <i>Judicial Review</i>	83
4.4 Pengaruh Dinamika Hubungan Antarpemerintahan terhadap Keberlanjutan KKR Aceh	89
4.4.1 Keberlanjutan KKR Aceh dan Pelemahan Pilar Regulatif.....	89
4.4.2 Bertahannya Pilar Normatif dan Kognitif.....	92
4.4.3 Implikasi Dinamika Hubungan Antarpemerintahan terhadap Keberlanjutan KKR Aceh	95
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	99
5.1. Simpulan	99
5.2 Saran.....	100
5.2.1 Saran Praktis	100
5.2.2 Saran Teoritis.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.1 Tabel Data Informan.....	44
Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian.....	47
Tabel 4.1 Data Wilayah dan jumlah pernyataan.....	50
Tabel 4.2 Dana Pagu Untuk KKR Aceh 2019-2023	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Surat Rekomendasi dari Kemendagri.....	14
Gambar 1. 2 Pelaksanaan MoU Helsinki	18
Gambar 4. 1 Kegiatan RDPU Rancangan Qanun KKR Aceh.....	51
Gambar 4. 2 Konferensi Pers NGO Aceh	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Persetujuan Sidang Akhir.....	106
Lampiran 2 Kartu Bimbingan	107
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	108
Lampiran 4 Dokumentasi dan Transkrip Wawancara	112